

# RENCANA KERJA TAHUN 2023



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

# B A B I

## PENDAHULUAN

### 1.A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (**Renja-PD**), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Penyusunan Rencana Kerja dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil Perangkat Daerah sesuai Peraturan Gubernur nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu. Rencana pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dan dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang agar dapat disusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Tahap penyajian Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (**RKPD**) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan

pendekatan teknokratis dan partisipatif. Rancangan awal RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD.

Maksud penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah. Menimbang maksud tersebut, maka penyusunan RKPD memiliki tujuan sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD ;
2. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD ;
3. Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

Tahap selanjutnya adalah Verifikasi dan Integrasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja SKPD pada SKPD terkait.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (**P. Renstra-PD**) Tahun 2019-2023 adalah dokumen perubahan perencanaan yang berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P.RPJMD) Tahun 2019-2023 dan bersifat indikatif. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, BPKAD Provinsi Sumatera Utara berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program, kegiatan dan sub

kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) dan laporan lainnya.

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provsu Tahun Anggaran 2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam Renja BPKAD Provinsi Sumatera Utara, selaras dengan Renstra BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Renja Tahun 2023 merupakan Renja terakhir pada jangka waktu Perubahan Renstra dan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023.

## **1.B. LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Seta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembar Daerah Provinsi sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 51);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 22).

### **1.C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, sedangkan tujuannya adalah menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara serta untuk mengetahui :

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.
2. Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.
3. Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.
4. Target Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.
5. Pagu indikatif program, kegiatan dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.
2. Mengevaluasi Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.
5. Sebagai salah satu dokumen pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

## **1.D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### **BAB. I Pendahuluan**

- 1.A. Latar Belakang
- 1.B. Landasan Hukum
- 1.C. Maksud dan Tujuan
- 1.D. Sistematika Penulisan

### **BAB. II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

- 2.A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.B. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - 2.2 Review terhadap RKPD
  - 2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

### **BAB. III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Tujuan, Sasaran dan Rencana Aksi Pelaksanaan serta Target KSD

### **BAB. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2023 dan Renja OPD Tahun 2023
- 4.3 Pagu Anggaran Untuk Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
- 4.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas
- 4.5 Indikator Kinerja Utama OPD

### **BAB. V. P e n u t u p**

## **B A B I I**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Untuk menjaga konsistensi terhadap capaian target kinerja antara perencanaan dengan pelaksanaan dan untuk mengambil langkah-langkah penyempurnaan perlu dilakukan review terhadap Renja PD tahun 2021 yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana realisasi program dan kegiatan bila dibandingkan dengan Renstra dan prakiraan capaian kinerja pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) tahun berjalan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran terlebih dahulu perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan salah satu sarana untuk mengukur pengeluaran belanja dengan kinerja yang dihasilkan atau yang disebut dengan metode penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dan terukur dalam penyusunan anggaran yang dilakukan suatu organisasi sektor publik dengan menggunakan indikator kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan.

##### **a. Evaluasi Anggaran Program dan Kegiatan**

Pada pelaksanaan program dan kegiatan tersedia anggaran belanja yang berguna untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan.

Jenis kelompok belanja Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari :

1. Belanja operasi; Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja modal; Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3. Belanja tidak terduga; Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja transfer; Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Anggaran dan realisasi belanja TA. 2021 antara lain :

1. Belanja Operasi dengan anggaran belanja sebesar Rp. 59.569.768.342,00 dan realisasi sebesar Rp. 49.392.437.578,00 atau 82,92%.
2. Belanja Modal dengan anggaran belanja sebesar Rp. 2.384.589.850,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.154.748.950,00 atau 90,36%.
3. Belanja Tidak Terduga dengan anggaran belanja sebesar Rp. 21.058.512.853,00 dan realisasi sebesar Rp. 805.581.714,00 atau 3,83%.
4. Belanja Transfer dengan anggaran belanja Rp. 2.576.947.489.813,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.574.379.999.535,00 atau 99,90%.

Jumlah anggaran belanja seluruhnya sebesar Rp. 2.659.960.360.858,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.626.732.767.777,00 atau 98,75%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja TA. 2021 dapat dilihat pada **Tabel. 2.1.**

**Tabel. 2.1**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja**  
**Tahun Anggaran 2021**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>BELANJA</b>			
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>59.569.768.342,00</b>	<b>49.392.437.578,00</b>	<b>82.92</b>
Belanja Pegawai	18.276.708.254,00	17.241.272.235,00	94.33
Belanja Barang dan Jasa	41.293.060.088,00	32.151.165.343,00	77.86
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.384.589.850,00</b>	<b>2.154.748.950,00</b>	<b>90.36</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.174.589.850,00	1.954.083.950,00	89.86
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	210.000.000,00	200.665.000,00	95.55
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>21.058.512.853,00</b>	<b>805.581.714,00</b>	<b>3.83</b>
Belanja Tidak Terduga	21.058.512.853,00	805.581.714,00	3.83
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>2.576.947.489.813,00</b>	<b>2.574.379.999.535,00</b>	<b>99.90</b>
Belanja Bagi Hasil	2.576.947.489.813,00	2.574.379.999.535,00	99.90
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.659.960.360.858,00</b>	<b>2.626.732.767.777,00</b>	<b>98.75</b>

## **b. Evaluasi Capaian Kinerja**

Evaluasi capaian kinerja mengacu pada evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan masa periode tertentu. Pada evaluasi capaian kinerja ini dengan menggunakan masa periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021.

Pada hasil evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2021 dapat dilihat pada **tabel 2.2 (tabel T-C.29)** dengan hasil sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang pada umumnya telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah adanya perubahan atas program pada Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 sehingga capaian program Tahun 2019 dan Tahun 2020 tidak dapat terdeteksi.

**Tabel 2.2 (T-C. 29)**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021**  
**BPKAD Provinsi Sumatera Utara**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Restra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (s/d 2019)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan				
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %			
1	2	3	4		5		6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)		11= 10/1		
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
	Keuangan										99					
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Tingkat Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>							<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100	%							100	%	100	%	100	%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100	%							100	%	100	%	100	%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	100	%							100	%	100	%	100	%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100	%							100	%	100	%	100	%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100	%							100	%	100	%	100	%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%							100	%	100	%	100	%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%							100	%	100	%	100	%

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%								100	%	100	%	100	%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>								<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	%								100	%	100	%	100	%
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100	%								100	%	100	%	100	%
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	%								100	%	100	%	100	%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	%								100	%	100	%	100	%
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%								100	%	100	%	100	%
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100	%								100	%	100	%	100	%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>								<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%								100	%	100	%	100	%

## **2.B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan Perangkat Daerah. Selain itu melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah diukur berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan tersebut diatas.

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada **Tabel. 2.3 (Tabel T-C.30).**



**Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian indikator antara lain :**

- a. Adanya keterlibatan pimpinan secara langsung;
- b. Koordinasi dengan perangkat daerah yang dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan;
- c. Adanya dukungan dari Pimpinan Daerah dalam rangka pengambilan keputusan;
- d. Pelaksanaan tindaklanjut atas Monitoring yang dilakukan terhadap kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

**Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapaian indikator antara lain :**

- a. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga masih terdapat hambatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan;
- b. Dilakukannya efisiensi anggaran perangkat daerah sehingga adanya beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana;
- c. Terbitnya Keputusan, Peraturan dan Perundang-undangan pada saat tahun berjalan.
- d. Kurangnya sumberdaya manusia (ASN) untuk pelaksanaan tugas terkait sehingga hasil kinerja kurang maksimal;

## **2.C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Untuk menjabarkan Visi dan Misi sebagaimana yang tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P. RPJMD) dimaksud, Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadikan Perubahan RPJMD sebagai dasar acuan untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis PD (P. Renstra PD) yang memuat tentang isu-isu strategis, perencanaan anggaran, program dan kegiatan. Berdasarkan Perubahan Renstra tersebut, dilakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara serta mensinergikan arah, kebijakan, visi dan misi Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan RPJMD 2019-2023 pada misi kedua :

**” Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis” atau Bermartabat Dalam Politik.**

Pada misi kedua mempunyai **tujuan** : Meningkatkan Kualitas Sistem Politik Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih, dan **sasaran** : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance), dengan indikator Opini BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan kinerja keuangan daerah.

Sebagai wujud atas capaian indikator adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memperoleh Opini BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 8 (delapan) kali terhadap laporan kinerja keuangan daerah tahun 2021.

Pada umumnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat terlaksana dengan baik. Adapun kendala-kendala untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sebagian besar karena dilakukan refocusing anggaran, perubahan nomenklatur dan efisiensi pagu anggaran kegiatan Badan pada APBD Tahun Anggaran berjalan. Mekanisme pelaksanaannya adalah untuk disesuaikan dengan proyeksi belanja yang diprediksi tidak tercapai.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi atas tidak terlaksananya beberapa kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang baik atas setiap kegiatan. Begitu juga dengan koordinasi antar bidang lebih ditingkatkan. Selain itu, perlu juga diadakan pelatihan / bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendukung kelancaran kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu. Koordinasi antar instansi/Perangkat Daerah (PD) dan Pemerintah Kabupaten / Kota baik dalam hal pengumpulan data dan lainnya, untuk lebih ditingkatkan.

Capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu antara lain:

1. Pada pengelolaan pendapatan daerah telah digunakan aplikasi Penerimaan Online yang terdapat pada menu aplikasi E-Keuangan dan terintegrasi dengan

aplikasi pada PT. Bank Sumut sehingga setiap setoran dapat diketahui jenis dan jumlah penerimaan daerah dan dapat diketahui jumlah seluruh pendapatan daerah pada setiap saat atau secara real time.

2. Untuk pengelolaan belanja daerah telah digunakan aplikasi SIPD yang terintegrasi dengan pemerintah pusat dan digunakan aplikasi Simda sebagai aplikasi pendukung yang dimulai dengan penganggaran, penatausahaan dan laporan belanja daerah sehingga tercipta system administrasi yang baik.
3. Pada pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/Aset telah menggunakan aplikasi Simbada Online. Aplikasi ini telah terintegrasi dengan Perangkat Daerah sehingga data Barang Milik Daerah (BMD)/ Aset Provinsi Sumatera Utara dapat diperoleh secara akurat.

Aplikasi telah di update dengan menggunakan QR Code guna pendataan Barang Milik Daerah (BMD) sehingga tidak perlu dilakukan pendataan dengan manual.

4. Pada pelaksanaan pembayaran dari rekening Kas Daerah Pemprovsu kepada perangkat daerah dan masyarakat/pihak ketiga digunakan aplikasi Cash Manajemen System (CMS) Kas Daerah sedangkan pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran perangkat daerah digunakan aplikasi Cash Manajemen System (CMS) Non SP2D.

Adapun Capaian Kinerja Kegiatan Prioritas (Tabel.2.4), dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (Tabel.2.5) yang dicapai antara lain yaitu :

Tabel. 2.4

**CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PRIORITAS  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	CAPAIAN 2021	
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	1.	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD	Bidang Pengelolaan Anggaran	Tersusun 2 Dokumen KUA dan PPAS APBD dan 2 Dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBD
		2.	Jumlah Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi	Jumlah Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi	Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi	Bidang Pengelolaan Anggaran	Diverifikasi 49 Dokumen RKA, dan 49 Dokumen Perubahan RKA
		3.	Jumlah Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Jumlah Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Bidang Pengelolaan Anggaran	Tersusun 1 Dokumen APBD dan 1 Dokumen Perubahan APBD
		4.	Jumlah Dokumen DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD yang di Verifikasi	Jumlah Dokumen DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD yang di Verifikasi	Dokumen DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD	Bidang Pengelolaan Anggaran	Diverifikasi 49 Dokumen DPA, dan 49 Dokumen Perubahan DPA
		5.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Pertanggungjawaban SKPD	Bidang Akuntansi	1 Dokumen Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
		6.	Jumlah Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD SKPD	Bidang Akuntansi	1 Laporan Semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya

2.	Mewujudkan penataan dan pengelolaan asset yang berkualitas	9.	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat	$\frac{\text{(Jumlah Tanah yang bersertifikat)}}{\text{(Jumlah seluruh tanah)}} \times 100\%$	Laporan Barang Milik Daerah	Bidang Aset	29,63 % Luas Tanah yang telah disertifikat
		10.	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Laporan Barang Milik Daerah yang disusun dalam rangka penyusunan neraca	Berita Acara Rekonsiliasi	Bidang Aset	Dokumen laporan aset 49 OPD
3.	Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan kab/kota	11.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD yang dievaluasi tepat waktu	$\frac{\text{(Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang APBD yang dievaluasi Tepat waktu paling lambat 15 hari kerja)}}{\text{(Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang APBD yang dievaluasi)}} \times 100\%$	Draf Ranperda/Ranperkada Kab/Kota tentang APBD	Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100% SK Gubsu tentang APBD Kab/Kota yang di evaluasi
		12.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Perubahan APBD yang dievaluasi tepat waktu	$\frac{\text{(Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang P.APD yang dievaluasi Tepat waktu paling lambat 15 hari kerja)}}{\text{(Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang P.APD yang dievaluasi)}} \times 100\%$	Draf Ranperda/Ranperkada Kab/Kota tentang Perubahan APBD	Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100% SK Gubsu tentang Perubahan APBD Kab/Kota yang di evaluasi
		13.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	$\frac{\text{(Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi Tepat waktu paling lambat 15 hari kerja)}}{\text{(Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi)}} \times 100\%$	Draf Ranperda/Ranperkada Kab/Kota tentang Pertanggungjawaban APBD	Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100% SK Gubsu tentang Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang di evaluasi

**Tabel. 2.5**  
**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**TAHUN 2021**

No.	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN 2020 (TAHUN DASAR)	TARGET TA. 2021	REALISASI TA. 2021
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	Proses penyusunan laporan pertanggungjawaban
2	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
4	Persentase Tanah Milik Pemprovsum yang disertifikasi	25,64	43,93	29,63
5	Persentase jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	100	100	100
6	Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P.APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	100	100	100

Pada indikator "Persentase Tanah Milik Pemprov yang disertifikasi tidak menacapai target yaitu Target sebesar 43,93 dan realisasi sebesar 29,63. Hal ini disebabkan antara lain :

- Aset tanah masih tercatat sebagai aset tanah PTPN;
- Tidak ditemukannya kesepakatan tabal batas aset tanah;
- Aset tanah masih termasuk kawasan hutan lindung;
- Adanya perbedaan yang signifikan luasan aset tanah pada KIB dengan luasan aset tanah riil.

#### **Tantangan :**

1. Peraturan Perundang-undangan/regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah Pusat pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
2. Euforia terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang sering menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku antara eksekutif, legislatif dan masyarakat baik yang di provinsi maupun di kabupaten/kota, namun kurang memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika yang berkembang.

#### **Peluang**

1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, melaksanakan fungsi Bendahara Umum daerah (BUD) yang berwenang antara lain mengesahkan DPA-SKPD dan menetapkan Surat Penyediaan Dana (SDP). Untuk itu BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
2. Sesuai Pasal 1 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, yang menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas antara lain melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD. Tugas tersebut saat ini dilaksanakan oleh Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

3. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka BPKAD Provinsi Sumatera Utara diharapkan lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Maka dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi dimana terlaksananya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dalam roda Pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara menetapkan beberapa Isu-Isu Strategis dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan pembangunan dan perkembangan Provinsi Sumatera Utara selama beberapa tahun dan dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan potensi pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara di masa depan serta dengan menelaah dokumen-dokumen perencanaan.

Salah satu permasalahan pokok atau permasalahan prioritas pembangunan sesuai Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 adalah Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan masalah Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah yang mempunyai akar masalah :

1. Pencapaian sasaran pembangunan tingkat daerah maupun Perangkat Daerah belum dikendalikan dengan baik dan bersistem
2. Pengelolaan penyelenggaraan dan manajemen pemerintahan dalam mendukung pelayanan publik belum maksimal

Dengan mendasari hal tersebut, dapat diketahui isu strategis/program prioritas yang menunjukkan urutan program prioritas, sebagai berikut :

1. Belum maksimal pengelolaan penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
2. Belum maksimal pengelolaan dan penatausahaan aset, dan penghapusan serta pengamanan aset daerah;
3. Belum maksimal pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota;

Dengan mengangkat 3 (tiga) Isu Strategis diatas diharapkan akan terbentuk Program-program dan berbagai kegiatan yang dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta dapat menjadikan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai pengelola keuangan dan aset daerah yang baik, bersih dan akuntabel dan tercapai mempertahankan Opini yang baik terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya.

Dalam rangka pembinaan keuangan kabupaten/kota maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah mempunyai peran memberikan dukungan pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 33 Kabupaten/Kota dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

### **2.3. Review terhadap RKPD**

Renja Perangkat Daerah Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di sesuaikan dengan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun berjalan. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Catatan tersebut antara lain terdapat program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

Hasil review dapat dilihat pada **Tabel 2.6.**

**Tabel 2.6 (T-C.31)**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
	<b>Keuangan</b>					<b>Keuangan</b>						
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Persentase Tingkat Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>30,986,926,367.00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Persentase Tingkat Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>30,986,926,367.00</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase Tingkat Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100	%	200,000,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase Tingkat Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100	%	200,000,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100	%	18,736,926,367.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100	%	18,736,926,367.00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	100	%	250,000,000.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	100	%	250,000,000.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100	%	550,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100	%	550,000,000.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100	%	3,500,000,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100	%	3,500,000,000.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	100,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	100,000,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	6,950,000,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	6,950,000,000.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	700,000,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	700,000,000.00

	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3,129,850,792,626.00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3,129,850,792,626.00</b>	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	%	6,994,200,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	%	6,994,200,000.00	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	2,233,000,000.00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	2,233,000,000.00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	%	8,343,000,000.00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	%	8,343,000,000.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	%	2,260,000,000.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	%	2,260,000,000.00	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	3,107,640,792,626.00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	3,107,640,792,626.00	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100	%	2,379,800,000.00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100	%	2,379,800,000.00	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>9,496,000,000.00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>9,496,000,000.00</b>	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	9,496,000,000.00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	9,496,000,000.00	

## B A B I I I

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan Sasaran Lembaga Nasional dikaitkan dengan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provsu mempunyai kaitan yang erat dimana tugas pokok dan fungsi harus mendukung Tujuan dan Sasaran Lembaga Nasional (Bina Keuangan Daerah Kemendagri). Keterkaitan Tujuan dan Sasaran diantaranya adalah :

**Tabel 3.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN NASIONAL**

<b>Tujuan Lembaga Nasional</b>	<b>Sasaran Nasional</b>
Meningkatkan akuntabilitas,transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif"	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;</li><li>2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan</li><li>3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.</li></ol>

Sedangkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara antara lain :

**Tabel. 3.2**  
**TUJUAN DAN SASARAN BPKAD PROVSU**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
1. Optimalisasi Pengeloaan Keuangan	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Optimalisasi Pengeloaan Aset	2. Mewujudkan Penataan dan Pengelolaan Aset yang berkualitas
3. Optimalisasi Pembinaan Pengeloaan Keuangan Kab/Kota	3. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu kepada Tujuan yaitu Optimalisasi keuangan, Aset dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Sasaran yaitu Meningkatnya Pengelolaan Keuangan, Mewujudkan Penataan dan pengelolaan aset yang berkualitas dan Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan kab/kota.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Lembaga Nasional yaitu meningkatkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, efisien dan tertib administrasi.

### **3.B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan Rencana Kerja-BPKAD Provsu yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain :

- a. Memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia secara maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat ;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang ;
- c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi serta sinergitas antar Perangkat Daerah, Pemerintahan Daerah maupun Pemerintah Pusat ;
- d. Meningkatkan komunikasi dan pengembangan data serta sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
- e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembiayaan yang didanai dari APBD Provsu.

Sasaran, adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi, yaitu :

- a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan anggaran, program kegiatan dan pengelolaan APBD ;
- b. Meningkatnya aspek transparansi, partisipatif, responsibilitas dan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.
- c. Meningkatnya jumlah dan jenis sumber-sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara maka Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 8 kegiatan dan 36 sub kegiatan;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 6 kegiatan dan 34 sub kegiatan;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 1 kegiatan dan 13 sub kegiatan.





Strategi pencapaian target indikator kinerja antara lain :

1. Melakukan koordinasi dan pendampingan

Adapun Tujuan dan Sasaran yang terkait dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sesuai **Tabel 3.4.**

**Tabel 3.4**  
**TUJUAN DAN SASARAN PADA RPJMD**

SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT											
BERMARTABAT DALAM POLITIK											
VISI											
	MISI 2	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET CAPAIAN						
					2019		2020		2021		2022
PAGU					REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	PAGU
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Governance)	Opini BPK terhadap Laporan Kinerja Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

### 3.2 Tujuan, Sasaran dan Rencana Aksi Pelaksanaan serta Target KSD

Tujuan atas pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yaitu menciptakan suasana Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan terlaksananya Tata Kelola yang baik dan bersih yang mendukung terciptanya Sumut Bermartabat.

Sedangkan Sasaran Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yaitu :

- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
- Opini BPK terhadap Laporan Kinerja Keuangan Daerah.

Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yaitu Melaksanakan Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan terhadap OPD atas pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan dukungan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah kabupaten/kota se-sumatera utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP).

Target Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yaitu :

- 1. Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi ke 10 (sepuluh) kali.
- 2. Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota 84% (delapan puluh empat persen)

**Tabel. 3.5**

**Tujuan, Sasaran, Rencana Aksi dan Target KSD**

No	Kegiatan Strategis Daerah	Tujuan	Sasaran	Rencana Aksi	Target
1	Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan dukungan pencapaian 80% (delapan puluh persen) opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah kabupaten/kota se-sumatera utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP)	Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah; 2. Opini BPK terhadap Laporan Kinerja Keuangan Daerah.	Melaksanakan Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan terhadap OPD atas pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan dukungan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah kabupaten/kota se-sumatera utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP).	1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Provinsi sebanyak 10 kali. 2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara sebanyak 84%

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

##### **A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu merupakan salah satu Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Asisten Administrasi Umum dan Aset.

Tugas Pokok Badan adalah berkaitan dengan Keuangan dan Aset yaitu :

“Merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah.”

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu menyelenggarakan fungsi :

- a. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang perbendaharaan dan kas daerah, anggaran, akuntansi dan pengelolaan aset;
- b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai tugas dan fungsinya berkenaan dengan misi ke dua yaitu "Mewujudkan Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Politik..." dengan tujuan "Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih" dengan sasaran "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance)". Indikator yang ingin dicapai terkait misi kepala daerah adalah "Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah" dengan target opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" untuk tahun 2019 sampai dengan 2023.

#### **4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2023 dan Renja OPD Tahun 2023.**

Adapun Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD Tahun 2023 dan Renja Tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain :

##### **A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

###### **➤ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

###### **➤ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD;
8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

➤ **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

➤ **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

➤ **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
10. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

➤ **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Mebel.

➤ **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

## **B. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

- **Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**
1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
  2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
  3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
  4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
  5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
  6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
  7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD;
  8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD;
  9. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan;
  10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah;
  11. Koordinasi Perencanaan Pembiayaan.
- **Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**
1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota;
  2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota;

3. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
4. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota;
5. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah.

➤ **Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
2. Penatausahaan Pembiayaan Daerah;
3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak ketiga (PFK);
5. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Hutang Daerah yang Timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas;
6. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait;
7. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.

➤ **Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah**

1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban;
2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
3. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, Blid, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi;

5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah.

➤ **Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

1. Analisis Investasi Pemerintah Daerah;
2. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
3. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
4. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi.

➤ **Kegiatan Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**

1. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah;
2. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.

### **C. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

➤ **Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

1. Penyusunan Standar Harga;
2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
3. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
4. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
6. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
7. Pengamanan Barang Milik Daerah;
8. Penilaian Barang Milik Daerah;
9. Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah;
10. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Pengapusan Barang Milik Daerah;
11. Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
12. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;

13. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

### 4.3. Pagu Anggaran Untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dialokasi anggaran dana yang tertuang dalam APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023. Adapun Pagu Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai pada lampiran **Tabel 4.1**.

### 4.4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas

Adapun anggaran program,kegiatan dan sub kegiatan prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah seperti **Tabel 4.2** dibawah ini :

**Tabel 4.2**

#### **PRGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	ANGGARAN	
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan dan Perundang-undangan	100%		<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>7.618.600.000</b>
					<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>6.409.600.000</b>
				a.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	537.800.000
				b.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	465.200.000
				c.	Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	139.600.000
				d.	Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA-SKPD	608.000.000
				e.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	147.600.000
				f.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	636.000.000

				g.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.709.900.000
				h.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.165.500.000
					<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>1.209.000.000</b>
				i.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	683.000.000
				j.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	526.000.000
2.	Mewujudkan penataan dan pengelolaan asset yang berkualitas	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat	84,42%		<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>5.229.000.000</b>
					<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>5.229.000.000</b>
				a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.217.000.000
		Persentase jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	100%	a.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	212.000.000
				b.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	500.000.000
				c.	Pengamanan Barang Milik Daerah	3.300.000.000
3.	Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD, Perubahan APBD dan	100%		<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>1.610.000.000</b>
					<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.610.000.000</b>

	kabupaten/kota	Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu		a.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	820.000.000
				b.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	375.000.000
				c.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	415.000.000

#### 4.5. Indikator Kinerja Utama OPD

Adapun target Indikator Kinerja Utama OPD terhadap Pembangunan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 antara lain :

**Tabel. 4.3**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD**  
**PADA PEMBANGUNAN DAERAH**

<b>No.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD PADA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>TARGET TAHUN 2021</b>	<b>TARGET TAHUN 2022</b>	<b>TARGET TAHUN 2023</b>
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
2	Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
3	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
4	Persentase Tanah Milik Pemprov yang disertifikat	43,93	64,17	84,42
5	Persentase Laporan Aset Daerah yang disusun	100	100	100
6	Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P.APD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	100	100	100

## **B A B   V**

### **P E N U T U P**

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sangat tergantung kepada kerjasama dan dukungan serta komitmen dan kemauan yang kuat dari seluruh komponen, sehingga seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada pelaksanaan penggunaan anggaran kegiatan perlu dievaluasi antara penganggaran anggaran kegiatan dan realisasi hasil anggaran untuk mencapai output yang dipergunakan sehingga dapat dinilai keberhasilan dari pelaksanaan sub kegiatan.

Kiranya rencana kerja ini dapat menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyusun anggaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta menjadi standar dalam pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.

#### **A.    Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.**

Rencana Kerja BPKAD sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapat dipergunakan, untuk :

1. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan ;
2. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan
3. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;
4. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun ;
5. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

## **B. Rekomendasi.**

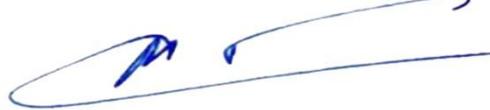
Dengan tersusunnya Renja-BPKAD ini, maka rekomendasi untuk pelaksanaan Renja Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan ;
2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan lebih cepat dan tepat ;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada masing- masing bidang.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Medan,

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



**Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19730824 199203 1 001**

TABEL 4.1 (T.C. 33) SIPD  
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA PAGU INDIKATIF  
TAHUN 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN					3.150.000.000.000				3.150.325.800.000				
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi			Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %			36.025.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	36.025.000.000
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja oleh BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %		100 %	300.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja oleh BPKAD	100 %	300.000.000
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja oleh BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	1 OPD	150.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	150.000.000
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah RKA yang disusun	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja oleh BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	1 OPD	20.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	20.000.000
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Perubahan RKA yang disusun	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja oleh BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	1 OPD	20.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	20.000.000
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah DPA yang disusun	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja oleh BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	1 OPD	20.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	20.000.000
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Perubahan DPA yang disusun	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja oleh BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	1 OPD	20.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	20.000.000
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja oleh BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	1 OPD	20.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	1	20.000.000
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Evaluasi yang dihasilkan	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja oleh BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	1 OPD	50.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	1	50.000.000
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %		100 %	18.905.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	1	18.905.000.000
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah PNS BPKAD Yang Menerima Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	150 Orang	1 OPD	17.050.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	17.050.000.000
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia/dibeli	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	50 item	1 OPD	195.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	195.000.000

5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah bukti pengeluaran yang diverifikasi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	150 dokumen	1 OPD	1.400.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1.400.000.000
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	12 Kali	1 OPD	20.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	20.000.000
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	1 OPD	50.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	50.000.000
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang disusun	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	1 OPD	20.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	20.000.000
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	1 OPD	150.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	150.000.000
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang dihasilkan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	1 OPD	20.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	20.000.000
5	02	01	1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi</b>		<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>300.000.000</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD</b>	<b>100 %</b>	<b>300.000.000</b>
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah laporan penatausahaan BMD yang disusun	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 dokumen	1 OPD	300.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	300.000.000
5	02	01	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi</b>		<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>1.645.000.000</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD</b>	<b>100 %</b>	<b>1.645.000.000</b>
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah pakaian dinas yang dilakukan pengadaannya	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	150 Stel	1 OPD	195.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	195.000.000
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah administrasi kepegawaian ASN yang diolah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	117 Orang	1 OPD	300.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	300.000.000
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	117 Orang	1 OPD	200.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	200.000.000
5	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Kegiatan	1 OPD	950.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	950.000.000
5	02	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi</b>		<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>4.990.000.000</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD</b>	<b>100 %</b>	<b>4.990.000.000</b>
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	50 Buah	1 OPD	200.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	200.000.000
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dibeli	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	40 Buah	1 OPD	700.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	700.000.000
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	50 Buah	1 OPD	300.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	300.000.000
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah bahan logistik yang disediakan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	117 Orang	1 OPD	750.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	750.000.000
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	50 Item	1 OPD	450.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	450.000.000
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	20 Item	1 OPD	50.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	50.000.000

5	02	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	300 Orang	1 OPD	195.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	195.000.000
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi yang dilakukan dalam dan luar daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	100 Kali	1 OPD	2.000.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	2.000.000.000
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah arsip dinamis yang ditatausahakan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	100 Dokumen	1 OPD	195.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	195.000.000
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah sarana/fasilitas yang disediakan untuk SPBE	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	20 Buah	1 OPD	150.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	150.000.000
5	02	01	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi</b>		<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>890.000.000</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD</b>	<b>100 %</b>	<b>890.000.000</b>
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah mebel yang dibeli	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	117 Unit	1 OPD	500.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	500.000.000
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Unit	1 OPD	195.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	195.000.000
5	02	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Unit	1 OPD	195.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	195.000.000
5	02	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi</b>		<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>6.060.000.000</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD</b>	<b>100 %</b>	<b>6.060.000.000</b>
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah surat, dokumen paket yang dikirim atau dikelola	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	3200 Buah	1 OPD	100.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100.000.000
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Rekening jasa sumber daya yang dibayarkan setiap bulan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	3 Jenis	1 OPD	3.000.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	3.000.000.000
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	150 Unit	1 OPD	350.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	300.000.000
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jenis dan jumlah pelayanan umum kantor yang dibayar setiap bulan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	5 Jenis	1 OPD	2.610.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	2.610.000.000
5	02	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi</b>		<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>2.935.000.000</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD</b>	<b>100 %</b>	<b>2.935.000.000</b>
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jenis dan jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	7 Unit	1 OPD	530.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	1	530.000.000
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	17 Unit	1 OPD	530.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	530.000.000
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Unit	1 OPD	195.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	195.000.000

5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah dan luas gedung kantor dan bangunan yang dipelihara/rehab	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Unit	1 OPD	200.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	200.000.000
5	02	01	1.09	10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	17 Unit	1 OPD	1.480.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1.480.000.000
5	02	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah</b>			<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>	<b>100 %</b>			<b>3.104.479.000.000</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>3.104.804.800.000</b>
5	02	02	1.01		<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>5.680.000.000</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>100 %</b>	<b>5.680.000.000</b>
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	2 Dokumen	49 OPD	480.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	480.000.000
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun tepat waktu	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	2 Dokumen	49 OPD	350.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	350.000.000
5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Berita Acara Review RKA-SKPD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	39 Dokumen	49 OPD	125.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	125.000.000
5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Berita Acara Review Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	39 Dokumen	49 OPD	580.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	580.000.000
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Berita Acara Review DPA-SKPD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	39 Dokumen	49 OPD	125.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	125.000.000
5	02	02	1.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Berita Acara Review Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	39 Dokumen	49 OPD	600.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	600.000.000
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang APBD yang disusun	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	8 Dokumen	49 OPD	1.360.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	1.360.000.000
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang disusun	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100%	9 Dokumen	49 OPD	1.600.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1	1.600.000.000

5	02	02	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	49 OPD	30.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	30.000.000
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	49 OPD	400.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	400.000.000
5	02	02	1.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	49 OPD	30.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	30.000.000
5	02	02	1.02		<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>Meningkatnya kemampuan kab/kota dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>2.227.000.000</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>Meningkatnya kemampuan kab/kota dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>100 %</b>	<b>2.227.000.000</b>
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang APBD kab/kota	Meningkatnya kemampuan kab/kota dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100%	33 Dokumen	33 Kab/Kota	816.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 persen	816.000.000
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang Perubahan APBD kab/kota	Meningkatnya kemampuan kab/kota dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	33 Dokumen	33 Kab/Kota	375.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 persen	375.000.000
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota	Meningkatnya kemampuan kab/kota dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	33 Dokumen	33 Kab/Kota	413.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 persen	413.000.000
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah asistensi yang dilakukan pada setiap kab/kota se-Sumut	Meningkatnya kemampuan kab/kota dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	206.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 persen	206.000.000
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah ASN yang menghadiri sosialisasi	Meningkatnya kemampuan kab/kota dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	100 Orang	33 Kab/Kota	417.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 persen	417.000.000
5	02	02	1.03		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>7.817.800.000</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>100 %</b>	<b>7.817.800.000</b>
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pemahaman SDM terhadap penggunaan aplikasi	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100%	49 OPD	49 OPD	5.650.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1	5.650.000.000

5	02	02	1.03	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya penatausahaan pembiayaan daerah	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	6 BUMD	49 OPD	50.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	50.000.000
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya laporan dana perimbangan dan dana transfer	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	12 Dokumen	49 OPD	590.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	590.000.000
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas, terlaksananya rekonsiliasi penyetoran pajak pusat ke RKUN	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	14 Dokumen	49 OPD	520.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	520.000.000
5	02	02	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya analisis piutang dan utang Pemprov	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	49 OPD	50.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	50.000.000
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah BA Rekonsiliasi dengan instansi terkait	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	49 OPD	670.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	670.000.000
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya regulasi atas pengelolaan keuangan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	4 Dokumen	49 OPD	287.800.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	287.800.000
5	02	02	1.04		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>4.024.200.000</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>100 %</b>	<b>4.350.000.000</b>
5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya rekonsiliasi dan verifikasi	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	12 Dokumen	49 OPD	580.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	610.000.000
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	2 Dokumen	49 OPD	792.200.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	850.000.000
5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas LKPD sesuai dengan SAP	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	49 OPD	627.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	680.000.000

5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perbendaharaan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan pergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	2 Dokumen	49 OPD	617.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	670.000.000
5	02	02	1.04	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyelesaian TPTKD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	49 OPD	355.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	390.000.000
5	02	02	1.04	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	49 OPD	355.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	380.000.000
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah partisipan yang hadir	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	100 Orang	49 OPD	698.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	770.000.000
5	02	02	1.05		<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>Meningkatnya kemampuan BPKAD dalam mengelola urusan pendukung yang merupakan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>3.084.330.000.000</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Meningkatnya kemampuan BPKAD dalam mengelola urusan pendukung yang merupakan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar</b>	<b>100 %</b>	<b>3.084.330.000.000</b>
5	02	02	1.05	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah analisis investasi yang disusun	Meningkatnya kemampuan BPKAD dalam mengelola urusan pendukung yang merupakan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	1 OPD	330.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	330.000.000
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Meningkatnya kemampuan BPKAD dalam mengelola urusan pendukung yang merupakan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu		33 Laporan	1 OPD	100.000.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		100.000.000.000
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Laporan pengelolaan dana darurat dan mendesak	Meningkatnya kemampuan BPKAD dalam mengelola urusan pendukung yang merupakan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Laporan	1 OPD	100.000.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	100.000.000.000
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya Penyaluran Dana Bagi Hasil	Meningkatnya kemampuan BPKAD dalam mengelola urusan pendukung yang merupakan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	33 Kabupaten/ Kota	1 OPD	2.884.000.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	2.884.000.000.000
5	02	02	1.06		<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola data keuangan daerah dengan SIPD</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>400.000.000</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola data keuangan daerah dengan SIPD</b>	<b>100 %</b>	<b>400.000.000</b>

5	02	02	1.06	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Laporan inventarisasi dan analisis data keuangan daerah	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola data keuangan daerah dengan SIPD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	49 OPD	200.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	200.000.000
5	02	02	1.06	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Laporan pengelolaan data APBD dengan aplikasi SIPD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola data keuangan daerah dengan SIPD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	49 OPD	200.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	200.000.000
5	02	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah</b>			<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>	<b>100 %</b>			<b>9.496.000.000</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>9.496.000.000</b>
5	02	03	1.01		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah</b>		<b>Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>	<b>100 %</b>		<b>100%</b>	<b>9.496.000.000</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>100 %</b>	<b>9.496.000.000</b>
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah dokumen standar harga yang dihasilkan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	49 OPD	650.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	650.000.000
5	02	03	1.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah dokumen standar BMD dan standar kebutuhan BMD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	2 Dokumen	49 OPD	255.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	255.000.000
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	49 Dokumen	49 OPD	321.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	321.000.000
5	02	03	1.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah pergub tentang pengelolaan BMD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	49 OPD	294.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	294.000.000
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah OPD yang melakukan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	49 OPD	49 OPD	1.217.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	1.217.000.000
5	02	03	1.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah OPD yang melakukan inventarisasi BMD sesuai ketentuan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	49 OPD	49 OPD	443.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	443.000.000
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah BMD yang mendapatkan perlindungan keamanan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	49 OPD	49 OPD	3.300.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	3.300.000.000
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah BMD yang mendapatkan penilaian	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	49 OPD	49 OPD	995.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	995.000.000
5	02	03	1.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah OPD Pemprov yang mematuhi Permendagri No 108 Tahun 2016	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	49 OPD	49 OPD	157.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	157.000.000
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah SK BMD Yang Dioptimalisasikan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	48 SK	49 OPD	994.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	994.000.000

5	02	03	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah BA rekonsiliasi BMD yang dihasilkan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	49 Dokumen	49 OPD	212.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	212.000.000
5	02	03	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah laporan BMD OPD Pemprov	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	49 Dokumen	49 OPD	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	500.000.000
5	02	03	1.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah kabupaten/kota yang menerima pembinaan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	33 Kab/Kota	49 OPD	158.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	158.000.000
<b>TOTAL</b>													<b>3.150.000.000.000</b>			<b>3.150.325.800.000</b>	